

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Penggunaan Aplikasi SIAKBA dalam Proses Rekrutmen Badan Ad hoc pada Pemilu 2024 di Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan ini telah membawa perubahan signifikan dalam sistem rekrutmen badan ad hoc. SIAKBA memberikan dampak efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya, karena pendaftar tidak perlu lagi mengurus dokumen berulang kali atau datang langsung ke kantor KPU. Selain itu, SIAKBA mampu menyusun database pendaftar secara lebih rapi, sistematis dan tahan lama, sehingga mempermudah proses pengarsipan serta pencarian data di kemudian hari. Penggunaan aplikasi SIAKBA pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan kebijakan KPU yaitu menciptakan proses rekrutmen badan ad hoc yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem digital ini, pendaftaran dapat mengurangi potensi kesalahan serta memperkuat aspek transparansi dalam seleksi badan ad hoc.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi SIAKBA masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek teknis. Masalah jaringan dan server yang sering mengalami gangguan pada jam sibuk menjadi hambatan utama, sehingga beberapa pendaftar harus mencari waktu alternatif untuk mengakses aplikasi. Selain itu, faktor literasi digital masyarakat juga mempengaruhi karena tidak semua calon pendaftar mampu beradaptasi dengan

teknologi yang digunakan. Oleh sebab itu, meskipun SIAKBA menawarkan kemudahan, perlu ada upaya tambahan seperti sosialisasi dan dukungan langsung dari KPU melalui fitur pendaftaran non mandiri serta helpdesk

KPU Kota Padang dan badan ad hoc selaku pelaksana dari kebijakan SIAKBA ini telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan kebijakan ini. Hal ini tercermin dari adanya koordinasi antarorganisasi, khususnya KPU RI, KPU Provinsi serta Bawaslu. Komunikasi yang terjalin melalui berbagai saluran baik formal maupun non formal, mendukung kelancaran implementasi kebijakan SIAKBA. Selain itu, sikap dan disposisi agen pelaksana juga terlihat dengan adanya upaya memberikan pelayanan terbaik bagi calon pendaftar badan ad hoc meskipun terdapat keterbatasan sumber daya. Lingkungan eksternal juga turut mempengaruhi implementasi SIAKBA, dari sisi ekonomi yang menjadi salah satu faktor pendorong minat masyarakat untuk mendaftar. Sementara dari sisi sosial, literasi digital dan akses terhadap perangkat teknologi menentukan sejauh mana masyarakat dapat beradaptasi secara mandiri. Dari sisi politik, independensi calon pendaftar badan ad hoc agar rekrutmen tidak terpengaruh oleh kepentingan golongan tertentu.

Secara keseluruhan, implementasi SIAKBA di Kota Padang telah memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi keberhasilannya masih sangat bergantung pada beberapa perbaikan. Perlu adanya peningkatan kualitas server, perbaikan fitur aplikasi serta sosialisasi yang lebih luas agar SIAKBA benar-benar mampu menjadi sistem yang berjalan sesuai dengan

prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam membantu proses rekrutmen badan ad hoc pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Secara Akademis, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut terkait aspek transparansi masyarakat terutama mengenai bagaimana tingkat literasi digital mempengaruhi keikutsertaan dalam proses rekrutmen berbasis teknologi. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji mengenai dampak jangka panjang dari penggunaan SIAKBA, misalnya dalam hal efektivitas kinerja badan ad hoc setelah melalui proses rekrutmen berbasis digital.
2. Secara Praktis
 - a. Saran untuk KPU Kota Padang, diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur aplikasi SIAKBA, terutama dari sisi server dan jaringan. Hal ini penting agar tidak terjadi kendala teknis yang berpotensi menghambat proses pendaftaran
 - b. Melakukan sosialisasi lebih intensif hingga tingkat kelurahan, agar masyarakat yang kurang melek akan teknologi dapat memahami penggunaan aplikasi. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan singkat atau pendampingan langsung saat proses pendaftaran.